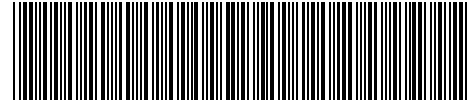




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.05.2.559858/2025**



DS:9256-9920-1942-3311

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
4. Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- Sebesar : Rp. 81.635.000 (DELAPAN PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.05.BF.1059 Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Jumlah Uang
Rp. 81.635.000
Rp. 81.635.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	81.635.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 81.635.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



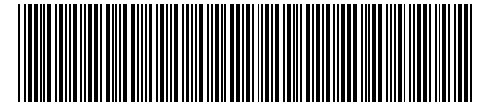
DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			81.635.000
Kegiatan	:	1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			81.635.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		2. 01	Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		3. 01	Jumlah Tenaga Teknis Yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		4. 01	Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		5. 02	Jumlah Jam Layanan Pos Bantuan Hukum			
		6. 02	Jumlah Kegiatan Peningkatan Manajemen Pelayanan Peradilan			
		7. 03	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan TUN			
		8. 04	Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1059.AEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	2.480.000
Rincian Output	:	01	AEA.002 Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	kegiatan	2.480.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	405.000
Rincian Output	:	01	BCA.001 Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1,00	Perkara	405.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96,00	Orang	33.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.001 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PN)	96,00	Orang	33.000.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	1,00	Perkara, Berkas Perkara	45.750.000
Rincian Output	:	01	QCA.002 Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara (PN)	1,00	Perkara	45.750.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : I A. 2

Perkara Hukum Perseorangan

Perkara, Berkas Perkara

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : I B. 1

				Pagu			Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	81.635.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	81.635.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



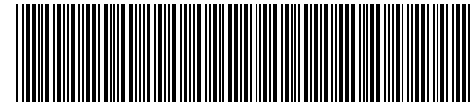
DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA	-	81.635	-	-	-	81.635		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	81.635	-	-	-	81.635		
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	-	81.635	-	-	-	81.635		
1059.AEA	Koordinasi (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	2.480	-	-	-	2.480	16 . 51	
01	RM	-	2.480	-	-	-	2.480	046	
1059.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	405	-	-	-	405	16 . 51	
01	RM	-	405	-	-	-	405	046	
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	33.000	-	-	-	33.000	16 . 51	
01	RM	-	33.000	-	-	-	33.000	046	
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (16.51 KALIMANTAN TIMUR / KOTA SAMARINDA)	-	45.750	-	-	-	45.750	16 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	45.750	-	-	-	45.750	046@	
JUMLAH		-	81.635	-	-	-	81.635		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
Kode>Nama Satker : (559858) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	206	4.806	2.606	2.606	48.356	2.606	2.606	4.606	2.606	2.606	2.606	5.419	81.635
		BELANJA BARANG	206	4.806	2.606	2.606	48.356	2.606	2.606	4.606	2.606	2.606	2.606	5.419	81.635
	005.05.BF.1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	206	4.806	2.606	2.606	48.356	2.606	2.606	4.606	2.606	2.606	2.606	5.419	81.635
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	206	4.806	2.606	2.606	48.356	2.606	2.606	4.606	2.606	2.606	2.606	5.419	81.635
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.891	22.483
		- PNB (425232)	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	205	2.350
		- PNB (425233)	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	433	437	5.200
		- PNB (425239)	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	1.249	14.933

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [559858] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
559858	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp. 22.725		
	52 Belanja Barang	Rp. 22.725		
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara			
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan			
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 22.725		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.05.2.559858/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9256-9920-1942-3311

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [05] Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
Provinsi : [16] KALIMANTAN TIMUR
Kode dan Nama Satker : [559858] PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL BADILMILTUN

ttd.
Marsda TNI Dr. YUWONO AGUNG NUGROHO, S.H., M.H.
NRP. 525775